

**PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN DANA
PERIMBANGAN TERHADAP BELANJA DAERAH
PEMERINTAH DI PULAU SUMATERA DAN
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

SKRIPSI



**Nama : Afrizal Ridho Ardiansyah
NIM : 22 2015 072**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
2020**

**PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN DANA
PERIMBANGAN TERHADAP BELANJA DAERAH
PEMERINTAH DI PULAU SUMATERA DAN
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi**



**Nama : Afrizal Ridho Ardiansyah
NIM : 22 2015 072**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
2020**

PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Afrizal Ridho Ardiansyah

Nim : 22 2015 072

Program Studi : Akuntansi

Dengan ini menyatakan :

1. Karya tulis ini asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik Sarjana Sastra Satu baik di Universitas Muhammadiyah Palembang maupun di perguruan tinggi lain
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan pembimbing
3. Dalam karya tulis ini terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naska dengan disebutkan nama pengarang yang telah dicantumkan dalam daftar pustaka
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang diperoleh karena karya serta sanksi hanya sesuai dengan norma yang berlaku diperguruan tinggi

Palembang, 2020

Yang membuat pernyataan,



Afrizal Ridho Ardiansyah

Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Palembang

TANDA TANGAN PENGESAHAN SKRIPSI

Judul : Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan
Terhadap Belanja Daerah Pemerintah di Pulau Sumatera
dan Kepulauan Bangka Belitung.
Nama : Afrizal Ridho Ardiansyah
NIM : 22 2015 072
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Program Studi : Akuntansi
Mata Kuliah Pokok : Akuntansi Sektor Publik

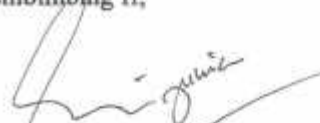
Diterima dan Disahkan
Pada tanggal 2020

Pembimbing I,



Drs. Sunardi, SE., M.Si
NIDN/NBM : 020604630/784021

Pembimbing II,



Lis/Djuniar, SE., M.Si
NIDN/NBM : 0220067101/1115716

Mengetahui,
Dekan

u.p. Ketua Program Studi Akuntansi



Betri, S.E., M.Si., Ak. CA
NIDN/NBM:0216106902/944806

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO :

- *Sukses cepat tercapai bila kita fokus pada apa yang kita inginkan, bukan pada hal yang kita takuti.*
- *Jangan takut gagal karena orang yang tidak pernah gagal hanyalah orang yang tidak pernah mencoba.*
- *Sesungguhnya dibalik dan sesudah kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila telah selesai(dari satu urusan) kerjakanlah dengan sungguh-sungguh urusan yang lain. Dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap.*

(Afrizal Ridho Ardiansyah)

Kupersembahkan kepada:

- *Ayah dan mama tercinta*
- *Kakek dan neneku*
- *Saudara-saudaraku*
- *Sahabat-sahabat seperjuangan*
- *Almamaterku Universitas
Muhammadiyah Palembang*



PRAKATA

Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarokatuh

Alhamdulillahirobbil A'lamin, puji syukur kehadiran Allah SWT. Berkat rahmat dan hidayat-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Daerah Pemerintah di Pulau Sumatera dan Kepulauan Bangka Belitung”**.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penulisan ini masih banyak kekurangan, namun penulis berusaha semaksimal mungkin untuk memberikan yang terbaik dalam menyelesaikan skripsi ini dengan harapan dapat bermanfaat untuk saat ini dan masa yang akan datang.

Ucapan terima kasih penulis sampaikan terutama kepada Allah SWT, yang telah memberikan jalan dan kemudahan serta kelancaran penulisan skripsi ini hingga dapat terselesaikan, penulis juga ingin menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada kedua orang tuaku, Ayah (Sucipto) Ibu (Luluk Hariyanti) saudara-saudaraku, yang telah mendidik, membiayai, mendoakan, dan memberi semangat serta kasih sayang yang begitu besar dan luar biasa kepada penulis, karena penulisan skripsi ini tidak akan pernah terjadi dan terselesaikan tanpa adanya bimbingan dari kedua orang tuaku. Serta penulis sampaikan ucapan terimakasih kepada Bapak Drs. Sunardi, SE., M.Si dan Ibu Lis Djuniar, SE., M.Siyang telah membimbing dan memberikan pengarahan dengan tulus dan

ikhlas dalam menyelesaikan skripsi ini. Selain itu disampaikan juga ucapan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah mengizinkan, membantu penulis dalam menyelesaikan studi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang, yaitu kepada:

1. Bapak Dr. Abid Djazuli, S.E, M.M, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang beserta Staf dan Karyawan.
2. Bapak Dr.s H. Fauzi Ridwan, M.M selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang beserta Staf dan Karyawan.
3. Bapak Betri Sirajuddin, S.E, M.Si, Ak.,CA Selaku Ketua program studi dan Ibu Nina Sabrina, S.E, M.Si, Selaku wakil program studi dan sekretaris Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Ibu Darmayanti S.E.,M.M.,Ak.,CA. selaku Pembimbing Akademik.
5. Seluruh Dosen, Karyawan serta Staf Administrasi Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Palembang.
6. Kepala Galeri Investasi BEI Universitas Muhammadiyah Palembang yang telah membantu dalam memberikan data untuk penyelesaian skripsi ini.
7. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan penulis satu persatu.

Semoga Allah SWT membalas budi kalian. Akhirukalam dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan banyak terimakasih, kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini, semoga amal ibadah

kalian semua mendapat balasan dari-Nya dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi yang membacanya.

Wasalamu'alaikum warahmatullah wabarakatuh

Palembang, 2020

Penulis

Afrizal Ridho Ardiansyah

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN DEPAN/COVER	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMANPERNYATAAN BEBAS PLAGIAT	iii
HALAMANPENGENSAHAN.....	iv
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN PRAKATA.....	vi
HALAMAN DAFTAR ISI.....	ix
HALAMAN DAFTAR TABEL	xii
HALAMAN DAFTAR GAMBAR.....	xiii
HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN	xiv
ABSTRAK	xv
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	9
BAB II. KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS	
A. Landasan Teori.....	11
1. Pengertian Otonomi Daerah.....	11
2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	12
3. Pendapatan Asli Daerah	13
a. Pengertian Pendapatan Asli Daerah.....	13

b. Sumber-sumber Pendapatan Daerah	14
4. Dana Perimbangan	17
a. Pengertian Dana Perimbangan	17
b. Sumber-sumber Dana Perimbangan.....	19
5. Belanja Daerah	25
a. Pengertian Belanja Daerah.....	25
b. Klasifikasi Belanja Daerah.....	25
c. Kelompok Belanja Daerah	26
B. Penelitian Sebelumnya.....	29
C. Kerangka Pemikiran.....	35
D. Hipotesis	36

BAB III. METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian.....	37
B. Lokasi Penelitian.....	38
C. Operasionalisasi Variabel.....	38
D. Populasi dan Sampel	39
E. Data yang Diperlukan	40
F. Metode Pengumpulan Data.....	41
G. Analisis Data dan Teknik Analisis.....	42
1. Analisis Data	42
2. Teknik Analisis	43
a. Statistika Deskriptif.....	44
b. Uji Asumsi Klasik.....	44
1) Rancangan Uji Normalitas	44
2) Rancangan Uji Multikolinieritas.....	44
3) Rancangan Uji Heteroskedastitas.....	45
4) Rancangan Uji Autokolerasi	45
c. Uji Hipotesis	46
1) Analisis Regresi Berganda	46
2) Uji Koefisien Determinasi	47

3) Uji Hipotesis secara bersama (Uji f)	47
4) Uji Hipotesis secara parsial (Uji t)	48
5) Uji Analisis Regresi Berganda	49

BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian	50
1. Sejarah Pulau Sumatera Selatan dan Kep.Bangka Belitung	50
2. Gambaran Umum Sampel Penelitian	51
3. Data Variabel Penelitian	60
4. Hasil Pengolahan Data	61
a. Uji Statistik Deskriptif	61
b. Uji Asumsi Klasik	62
1) Uji Normalitas	62
2) Uji Heteroskedastitas	64
3) Uji Multikolonieritas	66
4) Uji Autokolerasi	67
c. Analisis Regresi Linier Berganda	68
d. Uji Hipotesis	69
1) .Uji Bersama (Uji f)	69
2) .Uji Parsial (Uji t)	70
B. Pembahasan Hasil Penelitian	73
1. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan terhadap Belanja Daerah Secara Bersama-sama	73
2. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Daerah	74
3. Pengaruh Dana Perimbangan terhadap Belanja Daerah.....	75

BAB V. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan	77
B. Saran.....	77

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel I.1 Realisasi Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Belanja Daerah Pemerintah Provinsi di Pulau Sumatera dan Kepulauan Bangka Belitung	7
Tabel II.1 Persamaan dan Perbedaan Penelitian Sebelumnya	34
Tabel III.1 Operasionalisasi Variabel	38
Tabel III.2 Populasi di Pulau Sumatera dan Kepulauan Bangka Belitung	39
Tabel III.3 Sampel di Pulau Sumatera dan Kepulauan Bangka Belitung	40
Tabel IV.1 Data Variabel Penelitian	60
Tabel IV.2 Hasil Statistik Deskriptif	62
Tabel IV.3 Hasil Uji Normalitas	64
Tabel IV.4 Hasil Uji Heteroskedastisitas	65
Tabel IV.5 Hasil Uji Multikolonieritas	66
Tabel IV.6 Hasil Uji Autokolerasi	67
Tabel IV.7 Hasil Uji Regresi Linier Berganda	68
Tabel IV.8 Hasil Uji Bersama (Uji f)	70
Tabel IV.9 Hasil Uji Parsial (Uji t)	71
Tabel IV.10 Hasil Uji Koefesien Determinasi	72

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar II.1 Kerangka Pemikiran	35
Gambar IV.1 Hasil Uji Normalitas (<i>normal P-P Plot</i>).....	63
Gambar IV.2 Hasil Uji Heteroskedastistas.....	65

Daftar Lampiran

- Lampiran 1 Hasil Pengolahan SPSS (Statistical Package for the Social Sciences)
- Lampiran 2 Surat Keterangan Selesai Riset dari Tempat Penelitian
- Lampiran 3 Fotocopy Kartu Aktivitas Bimbingan Skripsi
- Lampiran 4 Sertifikat AIK
- Lampiran 5 Sertifikat Toefl
- Lampiran 6 Certificate of Completion
- Lampiran 7 Plagiarism Chacker X Originality Report
- Lampiran 8 Sertifikat BUMDes
- Lampiran 9 Sertifikat Pasar Modal
- Lampiran 10 Berita Acara
- Lampiran 11 Lembar Persetujuan Skripsi
- Lampiran 12 Biodata Penulis

ABSTRAK

Afrizal Ridho Ardiansyah / 222015072/ 2020/Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan terhadap Belanja Daerah Pemerintah di Pulau Sumatera dan Kepulauan Bangka Belitung / Akuntansi Sektor Publik.

Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan terhadap Belanja Daerah Pemerintah di Pulau Sumatera dan Kepulauan Bangka Belitung. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian asosiatif. Data yang digunakan yaitu data sekunder. Metode pengumpulan data yaitu dengan menggunakan Metode dokumentasi. Metode analisis dan teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif dan kuantitatif dengan bantuan program *statistical program special science* (SPSS). Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara bersama pendapatan asli daerah dan dana perimbangan positif dan signifikan memengaruhi belanja daerah. Secara parsial diperoleh bahwa pendapatan asli daerah positif dan signifikan memengaruhi belanja daerah. Sementara dana perimbangan negative dan signifikan memengaruhi belanja daerah.

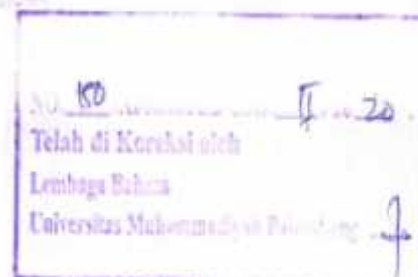
Kata kunci : Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Belanja Daerah

Abstract

Afrizal Ridho Ardiansyah/222015072/2020/The Effect of Regional Original Revenue and Balancing Funds on Regional Government Spending on Sumatra Island and Bangka Belitung Island / Public Sector Accounting.

The purpose of this research was to determine the Effect of Regional Original Revenue and Balancing Funds on Regional Government Spending in Sumatra Island and Bangka Belitung Island. The type of this research was associative. The data used was secondary data. Data collection method used the documentation. The analytical methods and data analysis techniques used in this research were qualitative and quantitative analyzes with the assisted by statistical programs special science (SPSS). The results of the research showed that local revenue and balance funds together were positive and significantly effected regional spending. Partially, it was found that the regional original income positively and significantly effected regional expenditure. While balance funds was negative and significantly effected regional spending.

Keywords: Regional Original Revenue, Regional Balance Funds and Expenditures



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dengan diberlakukannya UU No. 9 tahun 2015 tentang pemerintahan daerah, maka setiap daerah diberikan kewenangan atau kebebasan dalam mengatur dan mengurus daerahnya sendiri sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku atau yang disebut dengan desentralisasi. Hal ini tentunya menjadi kesempatan yang baik bagi pemerintah daerah untuk menggali kemampuan daerahnya, dalam hal ini pemerintah daerah diharapkan dapat meningkatkan kemampuannya dalam melaksanakan pembangunan dengan cara menggali sumber-sumber potensial yang berada di daerah. Sumber-sumber potensial tersebut disebut dengan nama Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Apabila dana yang digunakan untuk membangun daerah lebih besar diambil dari pendapatan asli daerah dibandingkan dengan dana perimbangan dari pemerintah pusat, maka daerah tersebut adalah daerah yang mandiri, dan sebaliknya apabila kontribusi pendapatan asli daerah lebih kecil daripada dana perimbangan, maka daerah tersebut termasuk dalam kategori daerah yang belum mandiri.

Kemandirian keuangan daerah diharapkan bias terwujud dengan otonomi daerah karena yang paling mengetahui kondisi daerah adalah pemerintah daerah itu sendiri, baik dari segi permasalahan yang ada sampai kesumber-sumber pendapatan yang bias digali oleh pemerintah daerah tersebut. Keberhasilan pemerintah daerah dalam meningkatkan pendapatannya akan

berimpikasi pada peningkatan kemampuan daerah dalam membiayai kebutuhan belanja daerah. Selain pendapatan asli daerah, komponen pendapatan daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah No 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyatakan bahwa yang menjadi sumber pembiayaan pembangunan daerah bukan hanya pendapatan asli daerah, namun ada transfer dari pemerintah pusat dan transfer antar-daerah dalam bentuk dana perimbangan. Dana perimbangan merupakan dana yang bersumber dari APBN yang disalurkan ke daerah untuk memenuhi kebutuhan belanja daerah.

Sumber pembiayaan pembangunan merupakan faktor yang paling menentukan dalam upaya melanjutkan dan meningkatkan laju pembangunan daerah. Laju pertumbuhan pembangunan daerah sangat ditentukan oleh kemampuan dalam menyediakan dana untuk pembangunan yang direncanakan. Inti pelaksanaan otonomi daerah adalah terdapatnya kekuasaan pemerintah daerah atas dasar prakarsa, kreativitas dan peran serta aktif masyarakat dalam rangka mengembangkan dan memajukan daerahnya.

Pelaksanaan otomoni daerah akan membawa suatu konsekuensi logis bahwa, tiap daerah harus berkemampuan untuk memberdayakan dirinya sendiri, baik dalam kepentingan ekonomi, pembinaan social kemasyarakatan dan pemenuhan kebutuhan untuk membangun daerahnya serta dapat melaksanakan peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Adanya hak, wewenang dan kewajiban yang diberikan kepada daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, merupakan satu upaya untuk

meningkatkan peran pemerintah daerah dalam mengembangkan potensi daerahnya dengan mengola sumber-sumber pendapatan daerah secara efisien dan efektif khususnya pendapatan asli daerah sendiri (Windhu, 2018: 151-152).

Semakin tinggi dana perimbangan dari pemerintah pusat dan pendapatan asli daerah, maka akan menambah nilai belanja dari pemerintah daerah dan sebaliknya semakin kecil dana perimbangan yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah serta semakin kecil perolehan pendapatan asli daerah, maka akan mengurangi belanja pemerintah daerah.

UU No. 18 tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun 2017 menjabarkan tujuan dari dana ^{perimbangan} adalah untuk mengurangi kesenjangan fiskal antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah serta pemerintah antar daerah guna tercapai adanya pemerataan pembangunan.

Untuk merealisasikan otonomi daerah tersebut, pemerintah pusat mengeluarkan dua peraturan yaitu Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun 2017. Tujuan utama ditetapkannya kedua Undang-Undang tersebut adalah desentralisasi. Desentralisasi tidak hanya berarti pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah akan tetapi yang lebih penting adalah efisiensi dan efektivitas, akuntabel, transparan, dan respontif secara berkesinambungan (Mardiasmo, 2009).

Perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah pada hakekatnya mencakup pembagian keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah secara proporsional, demokratis, adil, dan transparan dengan memperhatikan potensi, kondisi dan kebutuhan daerah. Dengan demikian, perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah adalah merupakan suatu sistem yang menyeluruh dalam rangka penyelenggaraan asas desentralisasi, dekonsentrasi maupun tugas pembantuan. Dari pengertian perimbangan keuangan tersebut mengandung cakupan pengertian yang cukup luas, yaitu bahwa pelaksanaan otonomi daerah ingin diwujudkan dalam suatu bentuk keadilan horizontal maupun vertikal dan berusaha mewujudkan tatanan penyelenggaraan pemerintah (dari sisi keuangan) yang lebih baik menuju terwujudnya *clean government* dan *good governance*. Secara utuh, desentralisasi fiskal mengandung pengertian bahwa untuk mendukung penyelenggaraan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab, kepada daerah diberikan kewenangan untuk mendayagunakan sumber keuangan sendiri dan didukung dengan perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Dengan demikian, perlu ditegaskan bahwa pelaksanaan otonomi daerah tidak hanya terfokus kepada dana bantuan dari pusat dalam bentuk dana perimbangan saja. Lebih penting dari itu adalah bagaimana kemampuan daerah untuk memanfaatkan dan mendayagunakan, serta mengelola potensi-potensi yang ada di daerah dalam rangka meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat dan pembangunan daerah.

Belanja daerah menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah, Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Belanja daerah dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan provinsi atau kabupaten/kota yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan jurusan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah atau pemerintah daerah yang ditetapkan dengan ketentuan perundangan-undangan. Dalam Peraturan Pemerintah No 12 Tahun 2019, pasal 30 disebutkan, sumber pendapatan daerah yang digunakan untuk membiayai belanja daerah adalah (1) Pendapatan asli daerah (PAD), (2) Dana Perimbangan, (3) Lain-lain penerimaan yang sah. Riyanto (2012) menyatakan faktor yang berpengaruh positif terhadap pengeluaran pemerintah daerah adalah (1) Pendapatan Asli Daerah (PAD), (2) Dana Perimbangan, (3) Pengeluaran pemerintah daerah tahun sebelumnya. Menurut Mardiasmo (2009), dengan PAD yang tinggi maka belanja daerah akan semakin besar salah satunya dengan meningkatnya subsidi pemerintah daerah kepada masyarakat lapisan bawah. Menurut Mahmudi (2016) tranfer dana perimbangan yang meningkat ke daerah akan meningkatkan pengeluaran pemerintah daerah melalui APBD.

Rasio kemandirian daerah dicerminkan oleh rasio pendapatan asli daerah terhadap total pendapatan. Dua rasio tersebut memiliki sifat berlawanan, yaitu semakin tinggi rasio pendapatan asli daerah semakin tinggi

kemandirian daerah dan sebaliknya untuk rasio dana perimbangan (transfer). Posisi tertinggi dan terendah rasio transfer umumnya berkebalikan dengan posisi provinsi yang bersangkutan pada rasio pendapatan asli daerah. Artinya, provinsi yang tertinggi untuk rasio pendapatan asli daerah merupakan rasio terendah untuk rasio transfer dan demikian pula sebaliknya.

Pendapatan asli daerah (PAD) menurut Undang-Undang tentang Pemerintah Daerah No. 23 Tahun 2014 adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. PAD terdiri dari pajak, retribusi daerah, pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain penerimaan yang sah. Sehingga dengan demikian keberhasilan pengguna dana tersebut ditentukan oleh pemerintah daerah.

Pulau Sumatera dan Kepulauan Bangka terdiri dari 9 Provinsi . Pada saat menjalankan aktivitas pemerintahannya dibutuhkan sumber-sumber pendapatan yang nantinya digunakan untuk melihat pengaruhnya terhadap belanja daerah. Berikut data APBD pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan belanja daerah Pemerintahan Pulau Sumatera dan Kepulauan Bangka Belitung yang disajikan pada tahun 2015-2018:

Tabel I.1
Realisasi Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Belanja Daerah
Pemerintah Provinsi di Pulau Sumatera Tahun Anggaran 2015-2018

(dalam jutaan rupiah)

Provinsi	Tahun	PAD (X1)	Dana Perimbangan (X2)	Belanja Daerah (Y)
Aceh	2015	1.972.049	1.561.778	12.135.635
	2016	2.060.180	1.572.466	12.119.713
	2017	2.276.305	3.802.879	13.832.848
	2018	2.359.385	3.735.791	12.306.306
Sumatera Utara	2015	4.883.880	1.521.253	7.959.167
	2016	4.954.833	5.219.273	9.476.423
	2017	5.287.469	6.928.134	12.518.868
	2018	5.638.960	7.055.134	12.563.387
Sumatera Barat	2015	1.876.733	1.390.876	4.022.256
	2016	1.964.148	2.576.754	4.504.037
	2017	2.134.010	3.868.405	5.759.818
	2018	2.275.090	3.930.814	6.267.376
Riau	2015	3.476.960	2.548.627	7.760.972
	2016	3.110.656	3.824.481	8.731.938
	2017	3.360.008	4.539.386	9.188.741
	2018	3.638.995	4.827.923	8.469.560
Jambi	2015	1.241.223	1.419.079	3.425.751
	2016	1.233.514	1.547.888	3.294.484
	2017	1.580.304	2.723.260	4.132.941
	2018	1.656.569	2.745.221	4.198.255
Sumatera Selatan	2015	2.534.526	2.329.728	5.190.198
	2016	2.546.177	2.506.312	4.962.572
	2017	3.031.633	4.061.113	6.409.382
	2018	3.528.010	5.513.017	7.941.143
Bengkulu	2015	701.300	1.208.985	2.282.344
	2016	731.556	1.616.462	2.029.690
	2017	804.575	1.997.884	2.868.814
	2018	872.257	1.478.045	2.979.580
Lampung	2015	2.247.342	1.514.291	4.781.202
	2016	2.368.796	3.158.712	5.476.921
	2017	2.750.596	2.643.744	6.948.838
	2018	2.864.235	2.816.327	7.538.988
Bangka Belitung	2015	571.802	1.130.400	1.869.958
	2016	574.258	1.126.284	2.069.868
	2017	709.832	1.539.960	2.359.078
	2018	850.441	1.436.593	2.364.345

Sumber : Data yang diolah oleh penulis, 2020

Tabel I.1 dapat dilihat bahwa pada tahun 2015 ada 6 Provinsi yang PAD nya lebih besar daripada Dana Perimbangan yaitu Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Sumatera Selatan dan Lampung. Pada tahun 2016 hanya ada 2 provinsi yang PAD nya yang lebih besar dari pada dana perimbangan (dana transfer) yaitu pada provinsi Aceh dan Sumatera Selatan sedangkan 6 provinsi lainnya yaitu Provinsi Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Jambi, Bengkulu, dan Provinsi Lampung, porsi dana transfer (dana perimbangan) masih mendominasi pendapatan daerahnya dalam APBD. Tahun 2017 dan 2018 hanya Provinsi Lampung yang PAD nya lebih besar daripada dana perimbangan (dana transfer) sedangkan 7 provinsi lainnya yaitu Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Jambi, Sumatera Selatan dan Provinsi Bengkulu masih bergantung pada dana perimbangan (dana transfer) dari pemerintah pusat. Dari data tersebut apakah terdapat pengaruh dari hasil Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan terhadap Belanja daerah pemerintah di Pulau Sumatera dan Kepulauan Bangka Belitung. Hal ini menunjukkan bahwa masih banyak provinsi yang pendapatan asli daerahnya lebih kecil dari dana perimbangan yang mengakibatkan provinsi daerah tersebut masih tergolong daerah yang belum mandiri atau daerah otonom.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul **Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Daerah Pemerintah di Pulau Sumatera dan Kepulauan Bangka Belitung.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan diatas, maka permasalahan yang dikemukakan dalam penelitian ini, bagaimanakah pengaruh pendapatan asli daerah dan dana perimbangan terhadap belanja daerah pemerintah di Pulau Sumatera dan Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2015-2018?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pendapatan asli daerah dan dana perimbangan terhadap belanja daerah pemerintah di Pulau Sumatera dan Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2015-2018.

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi penulis

Sebagai bukti empiris yang ada tentang pengaruh pendapatan asli daerah dan dana perimbangan terhadap belanja daerah pemerintah di Pulau Sumatera dan Kepulauan Bangka Belitung.

2. Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada pemerintah khususnya mengenai pengaruh pendapatan asli daerah dan dana perimbangan terhadap belanja daerah pemerintah di Pulau Sumatera dan Kepulauan Bangka Belitung.

3. Bagi Almamater

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi tambahan tentang pendapatan asli daerah dan dana perimbangan terhadap belanja daerah, serta dapat menjadi acuan atau kajian penulis di masa yang akan datang.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim. (2014). *Akuntansi Keuangan Daerah (Edisi 4)*. Jakarta : Salemba Empat.
- Abdul Halim. (2018). *Akuntansi Sektor Publik (Edisi 2)*. Jakarta : Salemba Empat.
- Baldric Siregar. (2017). *Akuntansi Sektor Publik (Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah Berbasis Akrua)*. Yogyakarta : UPP STIM YKPN.
- Hanny Yulsiati, Sandrayati, Oktariani. (2016). *Journal Research and Analysis Accounting and Financial*. e-ISSN: 2597-6613
- Hessel Nogi S. Tangkilisan. (2005). *Manajemen Publik*. Cetakan Pertama. Jakarta: Grasindo.
- I Dewa Gde Bisma, Hery Susanto. (2010). Evaluasi Kinerja Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2003 – 2007. *Ganec Swara Edisi Khusus* Vol. 4 No.3.
- Indra Bastian. (2010). *Akuntansi Sektor Publik Suatu Pengantar (Edisi 3)*. Jakarta : Erlangga.
- Khubbi Abdillah, Djoko Mursinto. (2016). *International Journal of Scientific and Research Publications*, Vol 6, Issue 5, May 2016.
- Mahmudi.(2010). *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Edisi 2)*. Yogyakarta : UPP STIM YKPN.
- Mahmudi. (2016). *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Edisi 3)*. Yogyakarta : UPP STIM YKPN.
- Masayu Rahma Wati, Catur Martian Fajar. (2017) Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan terhadap Belanja Daerah Kota Bandung. *Jurnal Kajian Akuntansi*, Vol 1, (1), 2017, 63-76
- Nabiyatun Nur Fatimah, Anita Nopiyanti, Danang Mintoyuwono (2016). Pengaruh pendapatan asli daerah dan dana perimbangan terhadap belanja daerah. *Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi* | Vol. 21 No.1
- Nur Achmad Budi Yulianto, Muhammad Maskan dan Alifiulahtin Utami Ningsih. (2018). *Metodelogi Penelitian Bisnis*. Malang : POLINEMA PRESS.
- Peraturan Pemerintah No 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri No 33 tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Peraturan Menteri Dalam Negeri No 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

Rudy Badrudin, Irawan Kuncorojati. (2017) *The effect of district own-source revenue and balance fund on public welfare by capital expenditure and economic growth as anintervening variable in special district of Yogyakarta*. JKM. Vol.19 No. 1, Maret 2017, 54-59

Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Penerbit Alfabeta.

Undang-Undang No. 18 tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Pemerintah Daerah.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pemerintahan Daerah

V. Wiratna Sujarweni. (2015). *Metodologi Penelitian Bisnis & Ekonomi*. . Yogyakarta: Penerbit Pustaka Baru Press.

Windhu Putra. (2018). *Tata Kelola Ekonomi Keuangan Daerah*. Depok : PT Raja Grafindo Persada.